



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
SUMATERA BARAT**

Oleh :

FEBRIAN YOSEFA
05 151 038

*Mahasiswa Program Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2010**



No. Alumni Universitas

FEBRIAN YOSFA

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a) Tempat/tanggal lahir : Bukittinggi / 22 Februari 1987 b) Nama Orang Tua : Fahmi HZ & Yusmaniar c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 05151038 f) Tanggal Lulus : 31 Desember 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,19 i) Lama Studi : 5 tahun 4 bulan h) Alamat Orang Tua : Jln. Manjato II, Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh

**Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Propinsi Sumatera Barat**

Skripsi S1 oleh: Febrian Yosfa Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Syafrizal, SE. MA

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan secara umum, dan menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil secara khusus terhadap pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data tahunan APBD Propinsi Sumatera Barat dan data PDRB Propinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif antara variabel Dana Perimbangan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah terkait untuk meningkatkan kondisi perekonomian Propinsi Sumatera Barat. Dalam realisasinya diharapkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian Dana Perimbangan diharapkan menjadi optimal sehingga perekonomian yang mapan dapat tercapai, dalam hal positif yang dipengaruhi oleh dana perimbangan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada : 31 Desember 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Prof. Dr. Syafrizal, SE. MA	Drs. Masrizal, M.Soc.Sc	Drs. Yusrizal Yulius, MA

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (revisi dengan UU no 32 tahun 2004 dan UU no 33 tahun 2004), yang diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi, dimana pola sentralisasi pada semua aspek membawa dampak tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan dengan sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat, karena memang rentangnya yang terlalu panjang.

Semangat kemandirian yang dikandung oleh kedua UU tersebut, memberikan penyelesaian atas berbagai masalah yang ada. Namun dalam pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada adanya kesepakatan berbagai pihak atas pelaksanaan kedua UU tersebut. Oleh karena itu peran Pemerintah Pusat di satu sisi masih sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, selain peran dari daerah pada sisi lainnya.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut, maka dana perimbangan dialokasikan sebagian besar dalam bentuk bantuan yang tidak disertai dengan petunjuk serta persyaratan-persyaratan khusus untuk penggunaannya. Hal ini memberikan implikasi penting kepada daerah yaitu

memperbesar kemungkinan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun disisi lain keberhasilan serta kegagalan pengalokasiannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Daerah (propinsi, kabupaten dan kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, tetapi dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2005). Adanya kewenangan yang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, 2002). Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat) dengan peningkatan produktivitas daerah. Desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

- a. mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di daerah masing-masing.
- b. memperbaiki alokasi sumber daya produksi melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap (Mardiasmo 2002).

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah (desentralisasi) adalah adanya disparitas (kesenjangan) fiskal antar daerah. Pemerintah pusat memberikan bantuan (*transfer*) kepada pemerintah daerah, salah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh konsentrasi spasial sektor industri dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Propinsi Sumatera Barat. Dari analisis didapat kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil estimasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa PDRB Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi secara signifikan oleh dana perimbangan daerah Propinsi Sumatera barat.
2. Dari hasil estimasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa PDRB Propinsi Sumatera Barat dipengaruhi secara signifikan secara bersama oleh Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Propinsi Sumatera barat.
3. Dana perimbangan sebagai instrumen desentralisasi fiskal dilihat dari sisi penerimaan daerah mempunyai peranan yang besar untuk memajukan daerahnya atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Bahwa adanya kebijakan otonomi daerah atau adanya kebijakan desentralisasi merupakan kebijakan yang tepat untuk memajukan peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan PDRB di daerah Propinsi Sumatera Barat.

Daftar Pustaka

- Akai, Nobuo and Masayo Sakata, 2002, " *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth : Evidence From State-Level Cross-Section Data for the United States* ", Journal of Urban Economics, volume 52, issue 1.
- Dartanto, Teguh, 2002, " *Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah : Analisa Model Makro Ekonometrik simultan* ", Jakarta, Skripsi sarjana IESP-FEUI.
- 2003, " *Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Inter-Governmental Transfer di Era Otonomi Daerah* ", Depok, disampaikan dalam Workshop Regional Finance kerjasama LPEM FEUI dan KANOPI SMFEUI, Februari.
- Dumairy, J., *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Gujarati, Damodar, 2003, " *Basic Econometrics* ", Mc Graw Hill.
- Gumilar, Gugun, 2006, " *ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI (UU No. 22 dan UU No. 25 TAHUN 1999) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA BARAT PERIODE 1994-2003* ", Skripsi Sarjana ESP-UNPAD, Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, " *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang* ", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahi, Raksaka, 2000, " *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antardaerah dan Peningkatan Efisiensi* ", Analisis CSIS, tahun XXIX/2000, No. 1, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, " *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* ", Andi, Universitas Michigan.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi ke-3, Andi Offset, Yogyakarta, (1995).
- Makmun, 2000, " *Desentralisasi dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah* ", Kajian Ekonomi dan Keuangan Tahun IV No.2, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni.